

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
ANGGARAN BA. 018
SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2024

BPSIP KALIMANTAN SELATAN

(Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2024)



Jl. Panglima Batur Barat No.4 P.O Box 1032 Banjarbaru 70714

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Banjarbaru, 5 Juli 2024

Kepala BPSIP Kalimantan Selatan

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc

NIP 197004241994031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
A.3. Basis Akuntansi	5
A.4. Dasar Pengukuran	5
A.5. Kebijakan Akuntansi	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1. Pendapatan	11
B.2. Belanja	12
B.2.1. Belanja Pegawai	13
B.2.2. Belanja Barang	13
B.2.3. Belanja Modal	14
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	15
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	15
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	15
C.3. Piutang Bukan Pajak	15
C.4. Persediaan	15
C.5. Tanah	16
C.6. Peralatan dan Mesin	16
C.7. Gedung dan Bangunan	16
C.8. Jalan, Irigasi dan Jaringan	16
C.9. Aset Tetap Lainnya	17
C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	17
C.11. Aset Tak Berwujud	17
C.12. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	17
C.13. Utang kepada Pihak Ketiga	18
C.14. Uang Muka dari KPPN	18
C.15. Ekuitas	18
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	19
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	19
D.2. Beban Pegawai	19
D.3. Beban Persediaan	20
D.4. Beban Barang dan Jasa	20
D.5. Beban Pemeliharaan	21

D.6	Beban Perjalanan Dinas	21
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	21
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	22
D.9	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	22
D.10	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	23
E.1.	Ekuitas Awal	23
E.2.	Surplus (Defisit) LO	23
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	23
E.4.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	23
E.5.	Transaksi Antar Entitas	23
E.6.	Ekuitas Akhir	23
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	24
VI.	Lampiran dan Daftar	25

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Banjarbaru, 5 Juli 2024
Kepala BPSIP Kalimantan Selatan

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP 197004241994031003

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku BPSIP Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp57.744.754 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp57.744.754 atau mencapai 46,76 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp123.500.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.730.893.151 atau mencapai 37,52 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.942.658.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2024 . Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp129.217.869.811 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp169.728.740; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp129.048.141.071 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp381.822.198 dan Rp128.836.047.613

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp58.226.868 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.637.552.464 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-4.579.325.596, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp99.310.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-4.480.015.596.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp129.647.029.812, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-4.480.015.596 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -4.115.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 3.673.148.397 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp128.836.047.613

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1.				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.	123.500.000	57.744.754	46,76	124.764.730
JUMLAH PENDAPATAN		123.500.000	57.744.754	46,76	124.764.730
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1.	5.162.548.000	2.205.625.731	42,72	2.187.557.747
Belanja Barang	B.2.2.	4.780.110.000	1.525.267.420	31,91	1.506.465.900
Belanja Modal	B.2.3.	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4.	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		9.942.658.000	3.730.893.151	37,52	3.694.023.647

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	60.000.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.	1.936.626	1.936.626
Piutang Bukan Pajak	C.3.	99.792.114	-
Persediaan	C.4.	8.000.000	13.070.000
Jumlah Aset Lancar		169.728.740	15.006.626
ASET TETAP			
Tanah	C.5.	108.622.116.915	108.622.116.915
Peralatan dan Mesin	C.6.	12.867.080.078	12.867.080.078
Gedung dan Bangunan	C.7.	19.260.926.912	19.260.926.912
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8.	5.012.037.020	5.012.037.020
Aset Tetap Lainnya	C.9	98.082.767	98.082.767
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10.	(16.812.102.621)	(16.225.720.506)
Jumlah Aset Tetap		129.048.141.071	129.634.523.186
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11.	13.372.790	13.372.790
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12.	(13.372.790)	(13.372.790)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		129.217.869.811	129.649.529.812
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13.	321.822.198	2.500.000
Uang Muka dari KPPN	C.14.	60.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		381.822.198	2.500.000
JUMLAH KEWAJIBAN		381.822.198	2.500.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.15.	128.836.047.613	129.647.029.812
JUMLAH EKUITAS		128.836.047.613	129.647.029.812
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		129.217.869.811	129.649.529.812

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	58.226.868	122.803.732
Jumlah Pendapatan		58.226.868	122.803.732
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.442.510.979	2.423.131.670
Beban Persediaan	D.3	77.449.950	11.235.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.032.692.440	1.009.339.000
Beban Pemeliharaan	D.5	278.884.030	182.766.650
Beban Perjalanan Dinas	D.6	218.677.950	344.244.250
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	955.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	586.382.115	672.341.367
Jumlah Beban		4.637.552.464	4.643.058.437
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.579.325.596)	(4.520.254.705)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	-	(85.125.000)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	99.310.000	28.725.006
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		99.310.000	(56.399.994)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(4.480.015.596)	(4.576.654.699)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(4.480.015.596)	(4.576.654.699)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 2023***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1.	129.647.029.812	129.880.904.587
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(4.480.015.596)	(4.576.654.699)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4.	(4.115.000)	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		(4.115.000)	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi Lain-Lain		-	-
Jumlah		(4.115.000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	3.673.148.397	3.569.258.917
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(810.982.199)	(1.007.395.782)
EKUITAS AKHIR	E.6.	128.836.047.613	128.873.508.805

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH AKUNTANSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Akuntansi Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan Permentan Nomor 16 Tahun 2006 tugas dan fungsi (Tusi) BPSIP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi spesifik lokasi. Sebagai UPT Pusat di daerah, BPSIP Kalimantan Selatan juga bertugas melakukan pendampingan program strategis Kemtan yang cenderung meningkat dan hampir keseluruhan program tersebut diimplementasikan di wilayah kerja BPSIP Kalimantan Selatan. Selain itu juga BPSIP Kalimantan Selatan mengemban tugas administratif sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang dan Wilayah. Dalam upaya peningkatan efisiensi tupoksi, diperlukan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan BPSIP dengan seluruh UK/UPT lingkup BSIP agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, sarana/prasarana, dan anggaran yang tersedia.

Dilihat dari sumberdaya manusia, jumlah SDM BPSIP Kalimantan Selatan sebanyak 45 PNS dan 4 PPPK. Menurut tingkat jabatan SDM BPSIP Kalimantan Selatan terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Struktural, 19 (Sembilan Belas) orang Pejabat Fungsional Khusus, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) orang dengan Jabatan Fungsional Umum. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui MONSAKTI yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring interkoneksi, rekonsiliasi, dan penyusunan Laporan Keuangan.

Data yang ditampilkan dan diolah MONSAKTI berasal data SAKTI didukung data SPAN dan data aplikasi lain yang terkait. MONSAKTI dikembangkan selain untuk memenuhi kebutuhan para pengguna SAKTI, juga dalam rangka menjaga performance SAKTI dengan memisahkan fungsi data transaksional (OLTP) dan data pelaporan (OLAP). Pada MONSAKTI terdapat beberapa fitur yang tersedia, di antaranya To Do List, Monitoring, Rekonsiliasi, Laporan (LK & LBMN), Daftar/Rincian, Validitas Data, Download Data Detail, dan Tematik.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari BPSIP Kalimantan Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp57.744.754

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp57.744.754 atau mencapai 46,76 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp123.500.000. Pendapatan BPSIP Kalimantan Selatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp57.744.754 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	123.500.000	57.744.754	46,76
Jumlah	123.500.000	57.744.754	46,76

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 53,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	57.744.754	124.764.730	(53,72)
Jumlah	57.744.754	124.764.730	(53,72)

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp57.744.754

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp57.744.754 dan Rp124.764.730. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar 53,72 dari TA 2023 disebabkan penjualan hasil pertanian hasil samping penjualan Gabah Konsumsi TAYL Kegiatan UPBS di TA sebelumnya lebih besar dibandingkan penjualan di TA berjalan. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	57.744.754	124.764.730	(53,72)
Jumlah	57.744.754	124.764.730	(53,72)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBPN Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	54.366.600	200.000	27.083,30
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.378.154	3.930.324	(14,05)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	-	118.059.400	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.575.006	(100,00)
Jumlah	57.744.754	124.764.730	(53,72)

Realisasi PNBP pada LRA senilai Rp 57.744.754 berbeda dengan LO senilai Rp 58.226.868. Terjadi selisih senilai Rp 482.114 disebabkan pada pencatatan di LRA menggunakan neraca kas sedangkan pada pencatatan di LO menggunakan neraca akrual, selisih tersebut berupa PNBP sewa rumah dinas yang dipotong langsung di gaji pegawai dimana SP2D gaji tersebut terbit di bulan berikutnya.

Realisasi Belanja
Rp3.730.893.151

B.2 Belanja

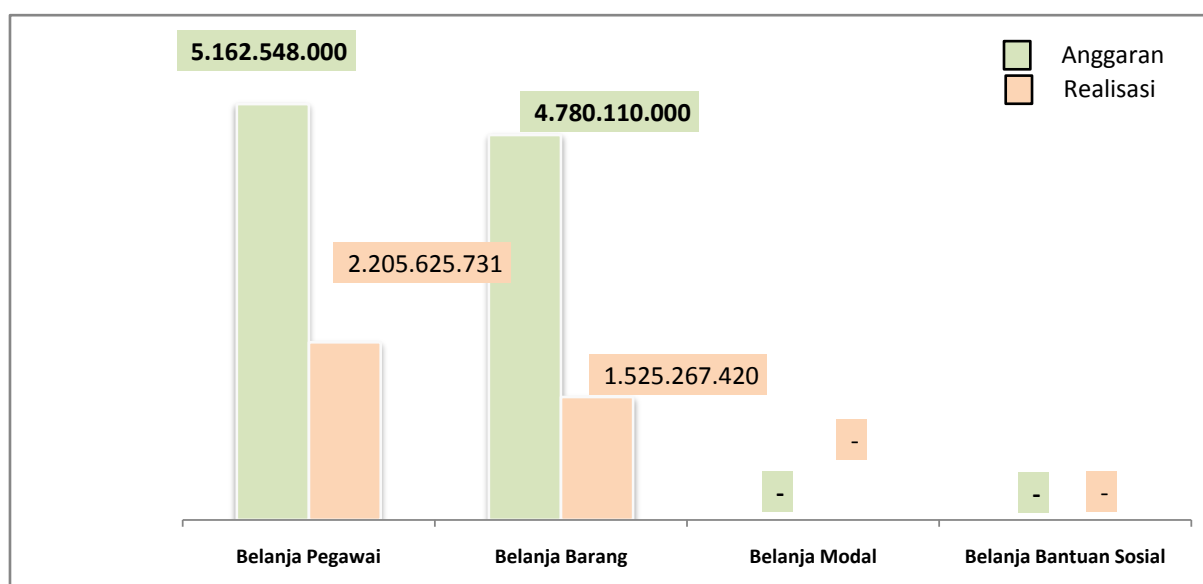
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp3.730.893.151 atau 37,52 % dari anggaran belanja sebesar Rp.9.942.658.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	5.162.548.000	2.205.625.731	42,72
Belanja Barang	4.780.110.000	1.525.267.420	31,91
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	9.942.658.000	3.730.893.151	37,52

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,00% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	2.205.625.731	2.187.557.747	0,83
Belanja Barang	1.525.267.420	1.506.465.900	1,25
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	3.730.893.151	3.694.023.647	1,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.205.625.731 dan Rp2.187.557.747. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,83 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan disebabkan adanya tambahan pegawai ASN pada Satker BPSIP Kalimantan Selatan yaitu penambahan PPPK sebanyak 4 pegawai, sehingga pada Semester I TA berjalan beban gaji lebih besar dibandingkan TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.492.487.900	1.493.350.700	(0,06)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.214	21.879	(3,04)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	122.179.110	123.184.160	(0,82)
Belanja Tunj. Anak PNS	31.962.876	32.351.180	(1,20)
Belanja Tunj. Struktural PNS	13.860.000	6.840.000	102,63
Belanja Tunj. Fungsional PNS	67.660.000	143.760.000	(52,94)
Belanja Tunj. PPh PNS	21.792.863	10.179.368	114,09
Belanja Tunj. Beras PNS	80.603.460	87.338.520	(7,71)
Belanja Uang Makan PNS	132.314.000	160.084.000	(17,35)
Belanja Tunjangan Umum PNS	46.260.000	44.805.000	3,25
Belanja Gaji Pokok PPPK	93.349.600	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.154	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.248.120	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	457.408	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.720.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.548.580	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	10.258.000	-	-
Belanja Uang Lembur	72.902.000	85.643.000	(14,88)
Jumlah Belanja kotor	2.205.627.285	2.187.557.807	0,83
Pengembalian Belanja Pegawai	1.554	60	2.490,00
Jumlah Belanja	2.205.625.731	2.187.557.747	0,83

Realisasi belanja pegawai pada LRA senilai Rp 2.205.625.731 berbeda dengan LO senilai Rp 2.442.510.979. Terjadi selisih senilai Rp 236.885.248 disebabkan pada pencatatan di LRA menggunakan neraca kas sedangkan pada pencatatan di LO menggunakan neraca akrual, selisih tersebut berupa pengajuan SPM gaji bulan Juli yang diajukan di bulan Juni dan SP2D gaji tersebut terbit pada bulan berikutnya.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.525.267.420 dan Rp1.506.465.900. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,25% dari Realisasi TA 2023.

Tidak ada terlalu banyak perbandingan realisasi antara TA berjalan dengan TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	606.176.090	644.892.750	(6,00)
Belanja Barang Non Operasional	240.365.000	226.098.000	6,31
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	78.019.730	9.492.500	721,91
Belanja Jasa	122.486.900	122.471.750	0,01
Belanja Pemeliharaan	278.314.250	178.416.650	55,99
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	199.905.450	325.094.250	(38,51)
Jumlah Belanja	1.525.267.420	1.506.465.900	1,25

*Realisasi Belanja Modal
Rp0*

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Tidak ada realisasi belanja modal pada Semester I TA berjalan dan TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.60.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas di bendahara pengeluaran	60.000.000	-
Jumlah	60.000.000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Merupakan uang muka dari KPPN sebesar Rp 60.000.000

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp1.936.626

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.936.626 dan Rp1.936.626. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	1.936.626,00	1.936.626,00
Jumlah	1.936.626	1.936.626

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

berupa dana Hibah TA sebelumnya yang telah disetorkan tetapi masih tercatat di Neraca Rp 1.936.626

Piutang Bukan Pajak
Rp99.792.114

C.3. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp99.792.114 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	99.792.114	-
Jumlah	99.792.114	-

Penjelasan tentang Piutang Bukan Pajak :

Rincian piutang lainnya terdiri dari PNPB sewa rumah dinas yang dibebankan ke gaji PNS bulan berikutnya sebesar Rp 482.114, dan Penerimaan Kembali Beban Pegawai TAYL berupa pengembalian tunjangan fungsional peneliti sebesar Rp 99.310.000.

Persediaan
Rp8.000.000

C.4. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.000.000 dan Rp13.070.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8.000.000	13.070.000
Jumlah	8.000.000	13.070.000

Penjelasan tentang Persediaan :

Persediaan tersebut di atas Merupakan persediaan UPBS

Tanah
Rp108.622.116.915

C.5. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp108.622.116.915 dan Rp108.622.116.915. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	108.622.116.915
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	
Saldo per 30 Juni 2024	108.622.116.915

Peralatan dan Mesin
Rp12.867.080.078

C.6. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp12.867.080.078 dan Rp12.867.080.078. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	12.867.080.078
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 30 Juni 2024	12.867.080.078
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(11.937.651.385)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	929.428.693

Gedung dan Bangunan
Rp19.260.926.912

C.7. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.260.926.912 dan Rp19.260.926.912. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	19.260.926.912
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 30 Juni 2024	19.260.926.912
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(3.364.272.669)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	15.896.654.243

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.012.037.020

C.8. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.5.012.037.020 dan Rp.5.012.037.020. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	5.012.037.020
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	5.012.037.020
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(1.510.178.567)
Nilai Buku per	3.501.858.453

Aset Tetap Lainnya
Rp98.082.767

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.98.082.767 dan Rp.98.082.767. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	98.082.767
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 30 Juni 2024	98.082.767
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	98.082.767

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp16.812.102.621

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp16.812.102.621 dan Rp16.225.720.506. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.867.080.078	(11.937.651.385)	929.428.693
2	Gedung dan Bangunan	19.260.926.912	(3.364.272.669)	15.896.654.243
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.012.037.020	(1.510.178.567)	3.501.858.453
4	Aset Tetap Lainnya	98.082.767	-	98.082.767
Akumulasi Penyusutan		37.238.126.777	(16.812.102.621)	20.426.024.156

Aset Tak Berwujud
Rp13.372.790

C.11. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp13.372.790 dan Rp13.372.790. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada BPSIP Kalimantan Selatan berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	13.372.790
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2024	13.372.790
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(13.372.790)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 13.372.790

C.12. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp13.372.790 dan Rp13.372.790. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	13.372.790	(13.372.790)	-
Total	13.372.790	(13.372.790)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp321.822.198

C.13. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp321.822.198 dan Rp2.500.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	236.885.248	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	84.936.950	2.500.000
Total	321.822.198	2.500.000

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Beban pegawai yang masih harus dibayar berupa SPM gaji untuk bulan Juli yang diajukan di bulan Juni sebesar Rp 221.385.005 untuk gaji PNS dan sebesar Rp 15.500.243 untuk gaji PPPK. Sedangkan beban barang yang masih harus dibayar berupa SPM gaji PPNPN untuk bulan Juni sebesar Rp 66.164.450 dan SPM LS perjalanan dinas sebesar Rp 18.772.500 yang baru terbit SP2Dnya di bulan Juli 2024.

Uang Muka dari KPPN
Rp60.000.000

C.14. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	60.000.000
Total	60.000.000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Merupakan uang muka dari KPPN sebesar Rp 60.000.000

Ekuitas
Rp128.836.047.613

C.15. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp128.836.047.613. dan Rp129.647.029.812. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp58.226.868

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp58.226.868 dan Rp122.803.732. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 52,59. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	54.366.600	200.000,00	27.083,30
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.860.268	4.544.332,00	(15,05)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	-	118.059.400,00	(100,00)
Jumlah	58.226.868,00	122.803.732,00	(52,59)

Realisasi PNBPN pada LO senilai Rp 58.226.868 berbeda dengan LRA senilai Rp 57.744.754. Terjadi selisih senilai Rp 482.114 disebabkan pada pencatatan di LO menggunakan neraca akrual sedangkan pada pencatatan di LRA menggunakan neraca kas, selisih tersebut berupa PNBPN sewa rumah dinas yang dipotong langsung di gaji pegawai dimana SP2D gaji tersebut terbit di bulan berikutnya.

Beban Pegawai
Rp2.442.510.979

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.442.510.979 dan Rp2.423.131.670.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 0,80 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.669.822.900	1.675.287.500	(0,33)
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.894	24.407	(10,30)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	137.195.280	138.089.830	(0,65)
Beban Tunj. Anak PNS	35.770.732	36.179.544	(1,13)
Beban Tunj. Struktural PNS	15.120.000	7.380.000	104,88
Beban Tunj. Fungsional PNS	75.960.000	161.730.000	(53,03)
Beban Tunj. PPh PNS	22.129.864	10.696.549	106,89
Beban Tunj. Beras PNS	90.235.320	97.911.840	(7,84)
Beban Uang Makan PNS	132.314.000	160.084.000	(17,35)
Beban Tunjangan Umum PNS	51.955.000	50.105.000	3,69
Belanja Gaji Pokok PPPK	105.819.200	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.325	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.854.360	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	514.584	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14.580.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.055.520	-	-

Belanja Uang Makan PPPK	10.258.000	-	-
Beban Uang Lembur	72.902.000	85.643.000	(14,88)
Jumlah	2.442.510.979	2.423.131.670	0,80

Realisasi belanja pegawai pada LRA senilai Rp 2.205.625.731 berbeda dengan LO senilai Rp 2.442.510.979. Terjadi selisih senilai Rp 236.885.248 disebabkan pada pencatatan di LRA menggunakan neraca kas sedangkan pada pencatatan di LO menggunakan neraca akrual, selisih tersebut berupa pengajuan SPM gaji bulan Juli yang diajukan di bulan Juni dan SP2D gaji tersebut terbit pada bulan berikutnya.

Beban Persediaan
Rp77.449.950

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp77.449.950 dan Rp11.235.500

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 589,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	77.119.950	11.235.500	586,40
Beban Persediaan bahan baku	330.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	77.449.950	11.235.500	589,33

Realisasi beban persediaan pada LO senilai Rp 77.449.950 berbeda dengan nilai transaksi keluar pada menu persediaan di aplikasi SAKTI sebesar Rp 86.344.730. Terjadi selisih senilai Rp 8.894.780 merupakan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp 7.939.780 dan beban persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 955.000 yang merupakan persediaan UPBS.

Beban Barang dan Jasa
Rp1.032.692.440

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.032.692.440 dan Rp1.009.339.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,31 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	507.910.540	377.619.620	34,50
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.680.000	60.050.000	(67,23)
Beban Barang Operasional Lainnya	144.750.000	219.233.130	(33,97)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.366.500	(100,00)
Beban Bahan	237.185.000	185.018.000	28,20
Beban Honor Output Kegiatan	3.180.000	11.800.000	(73,05)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	29.280.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	84.032.650	78.511.200	7,03
Beban Langganan Telepon	14.917.750	14.921.550	(0,03)
Beban Langganan Air	13.536.500	26.539.000	(48,99)
Beban Jasa Profesi	7.500.000	-	-
Jumlah	1.032.692.440	1.009.339.000,00	2,31

Realisasi beban barang dan jasa pada LO senilai Rp 1.032.692.440 berbeda dengan nilai neraca percobaan kas sebesar Rp 86.344.730. Terjadi selisih senilai Rp 63.664.450 merupakan gaji PPNPN bulan Juni sebesar Rp 66.164.450 yang terbit SP2Dnya di bulan Juli dan beban langganan air di bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp 2.500.000 yang di catat di jurnal penyesuaian.

Beban Pemeliharaan
Rp278.884.030

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp278.884.030 dan Rp182.766.650.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 52,59 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	211.602.950	66.360.000	218,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.341.300	114.006.650	(47,95)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.939.780	2.400.000	230,82
Jumlah	278.884.030	182.766.650	52,59

Beban Perjalanan Dinas
Rp218.677.950

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp218.677.950 dan Rp344.244.250

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 36,48 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	173.677.950	344.244.250	(49,55)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000	-	-
Jumlah	218.677.950,00	344.244.250	(36,48)

Realisasi beban perjalanan dinas pada LO senilai Rp 218.677.950 berbeda dengan nilai neraca percobaan kas sebesar Rp 199.905.450. Terjadi selisih senilai Rp 18.772.500 merupakan beban perjalanan dinas yang SPMnya di ajukan di bulan Juni dan baru terbit SP2Dnya di bulan Juli.

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp955.000

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp955.000 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	955.000	-	-
Jumlah	955.000,00	-	-

Beban persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 955.000 merupakan hasil penjualan persediaan UPBS

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp586.382.115 dan Rp672.341.367.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	217.450.135	290.541.800	(25,16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	258.158.947	263.515.703	(2,03)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	26.978.224	34.489.056	(21,78)
Beban Penyusutan Irigasi	82.315.228	82.315.228	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.479.581	1.479.580	0,00
Jumah Penyusutan	586.382.115	672.341.367	(12,79)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	586.382.115	672.341.367	(12,79)

D.9. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-85.125.000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(85.125.000)	(100)
Jumlah	-	(85.125.000)	(100)

D.10. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp99.310.000 dan Rp28.725.006.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	99.310.000	2.575.006,00	3.756,69
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	26.150.000,00	(100)
Jumlah	99.310.000,00	28.725.006	245,73

Penerimaan kembali beban pegawai TAYL merupakan pengembalian belanja tunjangan fungsional peneliti dari bulan September 2022 s.d September 2023 sebanyak 5 pegawai, yaitu an. :

1. Dr. Ahmad Subhan, M.Sc sebesar Rp 34.660.000
2. Lelya Pramudyani, SP, MP sebesar Rp 23.475.000
3. Abdul Sabur, S.Hut, MP sebesar Rp 13.725.000
4. Awanis, STP, M.Si sebesar Rp 13.725.000
5. Fiqy Hilmawan, S.Pt, M.Si sebesar Rp 13.725.000

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp129.647.029.812,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.129.647.029.812,00 dan Rp.129.880.904.587,00

Defisit LO Rp.-
4.480.015.596,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.-4.480.015.596,00 dan Rp.-4.576.654.699,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-4.115.000 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Koreksi Nilai Persediaan
Rp-4.115.000,00

E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-4.115.000,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	(4.115.000)
Jumlah	(4.115.000,0)

Merupakan koreksi nilai jual benih UPBS yang sudah kadaluarsa, sehingga ada penyusutan nilai barang persediaan.

Transaksi Antar Entitas
Rp3.673.148.397

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.673.148.397 dan Rp.3.569.258.917. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.730.893.151
Diterima dari Entitas Lain	(57.744.754)
Jumlah	3.673.148.397

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DKEL sebesar Rp 3.730.893.151, sedangkan DDEL sebesar Rp 57.744.754

Ekuitas Akhir
Rp128.836.047.613

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.128.836.047.613,00 dan Rp.128.873.508.805,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Penyelesaian Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional

Sesuai dengan surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian nomor B-1560/KU.060/H.1/06/2024 perihal Penyelesaian Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional, maka pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan telah dicatat kelebihan tunjangan fungsional pada modul piutang sebagai pengungkapan dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Baru	Pengembalian ke Kas Negara
1	Dr. Ahmad Subhan, M.Sc	Kepala BPSIP Kalimantan Selatan / Analisis Standardiasi Ahli Madya	Rp 34.660.000,00
2	Lelya Pramudyani, SP, MP	Analisis Standardisasi Ahli Muda	Rp 23.475.000,00
3	Abdul Sabur, S.Hut, MP	Analisis Standardisasi Ahli Muda	Rp 13.725.000,00
4	Awanis, STP, M.Si	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Rp 13.725.000,00
5	Fiqy Hilmawan, S.Pt, M.Si	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Rp 13.725.000,00
		Jumlah	Rp 99.310.000,00

Dokumen pendukung terkait penyelesaian piutang berupa Surat Pernyataan dari Kepala BPSIP Kalimantan Selatan, SPTJM dan SK pemberhentian dan pengangkatan jabatan fungsional terlampir.